

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S. (2023). Network Governance Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225>
- Akbar, M. F., Alwi, Susanti, G., & Nahrudin, Z. (2022). Collaborative Arrangement in the Implementation of Food Security Policy in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 21(2), 39–48. <https://doi.org/10.13165/VPA-22-21-2-08>
- Alta, Aditya & B, M. D. M. R. (2023). *Berjasa turunkan kemiskinan, tapi petani tak kunjung sejahtera*. The Conversation. https://theconversation.com/berjasa-turunkan-kemiskinan-tapi-petani-takkunjungsejahtera206941?utm_medium=email&utm_campaign=Nawala TCID - Ekbis 060723&utm_content=Nawala TCID - Ekbis 060723+CID_a2a946a612cbdce290364fe171aa2e40&utm_source=campaign_monit
- Alwi. (2022). *Governance dan Kebijakan Publik* (1st ed.). UPT Unhas Press.
- Alwi, & Susanti, G. (2022). Effectiveness Of Managing Network Structure Through Local Collaborative Governance Capacity In The Implementation Of Food Security Policy In Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(6), 4496–4504. <http://journalppw.com>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2021). *Statistik Tanaman Holtikultura Kabupaten Bone*. July, 1–23.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2023). *Kabupaten Bone dalam angka 2023*.
- Barry Z. Posner & James M. Kouzes. (1993). Psychometric properties of the leadership practices inventory - updated. *Educational and Psychological Measurement*, 53.
- Capella, A. C. N. (2012). *The policy Entrepreneur and the public policy process*. In: Paper presented – XXII world congress of political science IPSA/international political science association.I.
- Cohen, N., & Aviram, N. F. (2021). Street-level bureaucrats and policy entrepreneurship: When implementers challenge policy design. *Public Administration*, 99(3), 12. <https://doi.org/10.1111/padm.12755>
- Creswell, W, J. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*. (edisi terj). Pustaka Pelajar.
- Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. (2022). *Rencana Strategis 2022-2024*.
- Aslinda. (2023). *Model kebijakan publik dan perubahan kebijakan* (Edisi

- Revi). K-Media.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson Education.
- Fadillah Putra. (2012). *New Public Governance* (UB Press (ed.); 1st ed.). UB Press.
- Fisher, Roger, and B. P. (1991). Getting to Yes : Negotiating Agreement Without Giving In. *Boston: Houghton Mifflin, 2nd ed.*
- Forouharfar, A. (2016). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, January*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Gatu Adie Pradana. (2020). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 6 No. 3 (2020)*, 6(1), 389.
- Hasanatul Rahmi, Dra. Jumiaty, M. S. (2020). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (studi kasus pengelolaan cadangan pangan pemerintahan desam melalui kelembagaan lumbung pangan)*. 1(1), 51–59.
- Hill, Michael, and Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. Sage Publication.
- Hill, P., & Hupe, A. (2013). Implementation Public Policy. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 5.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-level bureaucracy and public accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Keban, T. Y. (2008). *Enam Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. (Edisi kedua). Gava Media.
- Kholifah, E. (2013). Pemikiran Kritis tentang Bureaucrat Street Level Theory oleh Michael Lipsky. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 18., 120–148.
- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Little, Brown & Company.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston: . *Boston : Harvard Business School Press*.
- Leite, L. Q. (2019). Public Policy Entrepreneurship. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1–5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3586-1
- Madani, M., Irvan Nur Iva, M., & Amiruddin, I. (2021). Peran Street Level Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal*

- Administrasi Publik*, 7(3), 333–343.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Michael Lipsky. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas on the individual in public service*. Russel Sage Foundation.
- Mintrom, M. (2019). So you want to be a policy entrepreneur? *Policy Design and Practice*, 2(4), 307–323.
<https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1675989>
- Mintrom, M., & Norman, P. (2009). Policy entrepreneurship and policy change. *Policy Studies Journal*, 37(4), 649–667.
<https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2009.00329.x>
- Mintrom M & Norman. (2009). *Policy entrepreneurship and policy change*. Policy Stud J.
- Mintrom M, V. S. (1996). Advocacy coalitions, policy entrepreneurs and policy change. *Policy Stud J*, 24(3), 420–434.
- Nurjannah, Rozaili, R. M. H. (2023). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Gampong Ranto Payang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie). *Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains*.
- Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*.
- Peraturan Badan Pangan Nasional. (2023). Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan.
- Petridou, E., & Beker, P. E. R. (2017). *Wirausaha Kebijakan dalam Administrasi Publik : Analisis Jaringan Sosial*.
- Arikuntoro. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (V). PT. RINEKA CIPTA.
- Riccucci, N. . (2005). Street-level bureaucrats and intrastate variation in the implementation of temporary assistance for needy families policies. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 89–111.
- Saldana., M. & H. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Setijaningrum, E., & Rahardian, R. (2022). The Power of Policy Entrepreneur in Disability- inclusive Policy-Making. *Policy & Governance Review*, 6(2), 176. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.504>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D*. IKAPI.
- Sulikah Asmorowati^{1*}, Charisma Husniati², D. R. A. (2023). *PERAN POLICY ENTREPRENEUR DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA*. 1–3.
- Susanti, G., & Sopia Rukmana, N. (2020). Going Local for Food Security: Strengthening Local Collaborative Institution in Implementation of Food

- Security in Indonesia. *International Journal of Management (IJM)*, 11(8), 1998–2009. <https://doi.org/10.34218/IJM.11.8.2020.176>
- Undang-Undang No. 18. (2012). Pangan. *Undang-Undang*,
- Winter S. C. (2002). Explaining Street-Level Bureaucratic Behavior in Social and Regulatory Policies. *Paper Prepared for the XIII Research Conference of the Nordic Political Science Association, Aalborg, Denmark, 15–17 August.*, 2.
- Zahariadis, Nikolaos, and T. E. (2016). “Policies that Succeed and Programs that Fail: Ambiguity, Conflict, and Crisis in Greek Higher Education. *Policy Studies Journal*, 44, 59–82.

LAMPIRAN

Lampiran 1, Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANANAN PANGAN

1. Apa saja masalah yang dihadapi dalam upaya menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan distribusi pangan ?
2. Siapa saja aktor yang terlibat langsung dilapangan ? dan apa peran mereka masing-masing ? (identifikasi street level bureacracy)
3. Bagaimana mekanisme pengawalan terhadap kebijakan pangan ? dalam hal menjamin aksesibilitas dan distribusi yang merata serta produktifitas pangan ?
4. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang sasarannya ialah masyarakat miskin ? jika ada, bagaimana pemerintah melaksanakan distribusi pangan terhadap masyarakat miskin ?
5. Langkah-langkah seperti apa yang dilakukan untuk mengkoordinir kegiatan tersebut ? siapa aktor yang berperan sebagai leading sektor di lapangan (street level bureacracy) ?

B. PENYULUH PERTANIAN

1. Bagaimana mekanisme pengawalan terhadap produktifitas pangan ?
2. Apakah ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan dengan masyarakat dalam upaya mewujudkan produktifitas pangan ?
3. Seperti apa input, proses, output program/kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendorong produktifitas pangan ?
4. Apakah ada tim/koalisi yang dibentuk bersama masyarakat/aktor-aktor lainnya dalam upaya meningkatkan produktifitas pangan ? jika ada, bagaimana peran penyuluh dalam tim tersebut ?

5. **Apa saja permasalahan yang dialami dalam melaksanakan peran tersebut ? dan bagaimana mengatasinya ?**

C. KEPALA DESA

1. **Bagaimana peranan pemdes dalam ikut serta berkontribusi dalam menjamin optimalisasi produksi, distribusi dan aksesibilitas pangan ?**
2. **Sebagai kepala desa seperti apa berperan ?**
3. **Apakah ada kebijakan pangan yang dikhususkan bagi masyarakat miskin ? jika ada, seperti apa ?**
4. **Apa/seperti apa masalah yang dihadapi ? Dan bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut ?**
5. **Apakah pemerintah desa terlibat dalam tim/koalisi bersama penyuluh, poktan, analis ketahanan pangan dan masyarakat ? (koordinasi, ada/tidaknya tim diidentifikasi).**
6. **Apakah ada masyarakat kategori miskin/ stunting ? dan apakah ada perlakuan khusus bagi mereka ?**

D. KELOMPOK TANI

1. **Bagaimana kelompok tani berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan beras ?**
2. **Apakah ada permasalahan dalam prosesnya ?**
3. **Bagaimana keterlibatan pemerintah mendorong produktifitas petani ?**
4. **Bagaimana pola koordinasi kelompok tani bersama kepala desa, penyuluh dan analis ketahanan pangan ? adakah intervensi melalui kebijakan yang dilakukan ? jika ada, bagaimana kelompok tani merespon kebijakan tersebut ?**

E. MASYARAKAT MISKIN

1. **Apakah kebutuhan pangan terpenuhi ?**
2. **Bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut ?**
3. **Adakah bantuan dari pemerintah ?**
4. **Apakah kebutuhan tersebut tersedia dipasaran ?**

5. Apakah kebutuhan tersebut bisa dibeli ?

Lampiran 2, Matriks Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
<p>Analisis Policy Enterpreneurship dalam Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus : Peran Street Level bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan Pangan Terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Bone</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana ketajaman sosial <i>street level bureaucracy</i> dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pangan masyarakat miskin di kabupaten Bone ? 6. Bagaimana peran <i>street level bureaucracy</i> dalam proses mendefinisikan masalah pada implementasi kebijakan pangan masyarakat terhadap miskin di Kabupaten Bone ? 7. Bagaimana <i>street level bureaucracy</i> berperan dalam membangun tim sebagai upaya mempengaruhi optimalisasi implementasi kebijakan pangan terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Bone ? 8. Bagaimana peran <i>street level bureaucracy</i> memimpin dengan contoh dalam mempengaruhi implementasi kebijakan pangan masyarakat miskin di kabupaten Bone agar di terapkan secara efektif ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketajaman Sosial 2. Pendefinisian Masalah 3. Membangun Tim 4. Memimpin dengan memberi contoh 	<p>Data primer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Ketahanan pangan 2. Penyuluh Pertanian 3. Kepala desa 4. Kelompok Tani (Poktan) 5. Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif 2. pengumpulan data dilakukan dengan <ol style="list-style-type: none"> a. wawancara b. observasi c. Dokumentasi

Lampiran 4 , izin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Handphone.081242764200, WhatsApp.+6281242764200
Laman: <http://lp2m.unhas.ac.id> email : lp2m@unhas.ac.id

Nomor : 02948/UN4.22.2/PT.01.04/2023 31 Juli 2023
Lamp. : ---
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
7. BAPPEDA Kabupten Bone
8. BAPPEDA Kabupten Gowa
9. BAPPEDA Kabupten Maros
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin bermaksud melaksanakan kegiatan Penelitian Fundamental Reguler pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai selesai dengan judul :

"Analisis Policy Entrepreneurship Dalam Jaringan Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan"

Ketua Tim Pelaksana : Prof. Dr. A l w i, M.Si.
Anggota Peneliti : Dr.Gita Susanti, M.Si
Mitra : -
Staf Pendukung : -
Mahasiswa Pengikut : Faisal Ardiansyah
Lokasi Penelitian : Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat dimohon kiranya berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan pengambilan data sesuai dengan judul penelitian yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n Ketua,
Sekretaris



Ir. Suharman Hamzah, Ph.D (Eng)., HSE
NIP. 197605032002121001

Tembusan Yth:

1. Ketua LPPM Unhas (Sebagai Laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
3. Kabag. Tata Usaha LPPM Unhas;
4. Pertinggal.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.



Lampiran 5, Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Andi Herman (Kepala Bidang distribusi pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone)



Wawancara bersama Bapak Sucipto (Koordinator Badan Penyuluh Pertanian Kab. Bone)



Wawancara bersama Bapak Andi Sepalawan,(Koordinator Badan Penyuluh Pertanian Kec. Ulaweng Kab. Bone)



Wawancara bersama Sekretaris Desa Jompie Kec. Ulaweng, Kab. Bone



Wawancara bersama UPT Penyuluhan Dinas Pertanian Kab. Bone



Wawancara bersama Kepala Desa Samaelo, Kec. Barebbo, Kab. Bone



Wawancara bersama Kepala Desa dan Ketua KWT Desa Jompie, Kab. Bone



Wawancara bersama Ketua KWT Desa Corawalie, Kec. Barebbo, Kab. Bone



Wawancara bersama Lurah Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge , Kab. Bone



Wawancara bersama Kepala Desa Corawalie, Kec. Barebbo, Kab. Bone



Wawancara bersama Kepala Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone



Pengambilan data lokus penelitian bersama Bappeda Kab. Bone



Sinkronisasi data kemiskinan bersama Kepala Dinas Sosial Kab Bone



Wawancara bersama Ketua KWT Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone



Wawancara bersama masyarakat Desa Corawalie, kec. Barebbo Kab. Bone



Wawancara bersama masyarakat desa pallawarukka



Wawancara bersama Masyarakat Desa Corawalie



Wawancara bersama Masyarakat Tokaseng



Wawancara anggota POKTAN Kel Tokaseng



Wawancara bersama Masyarakat kelurahan Tokaseng



Wawancara bersama masyarakat Desa Samaelo

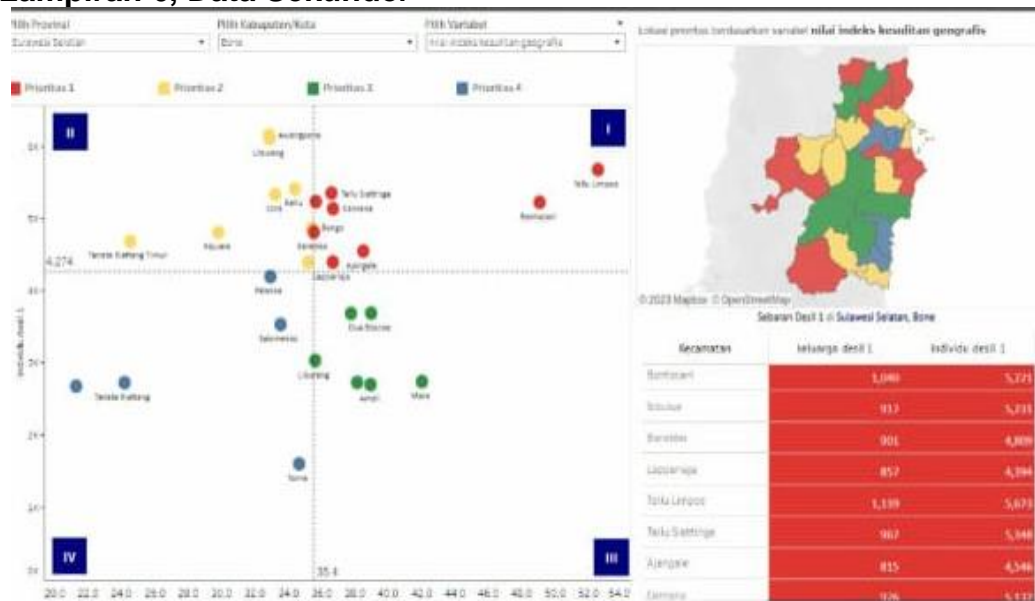


Wawancara bersama masyarakat Desa Itterung



Wawancara bersama Masyarakat Desa Itterung

Lampiran 6, Data Sekunder



Data peta kemiskinan extream Kabupaten Bone